

PUTUSAN

Perkara Nomor: 15/KPPU-L/2007

Ko	omisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (selanjutnya disebut Komisi)
yar	ng memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahur
199	99 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya
dis	ebut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999), yang dilakukan oleh:
1.	PT. Prabu Makmur, yang beralamat kantor di Jalan Radial No. 25, Palembang,
	selanjutnya disebut Terlapor I ;
2.	PT. Sungai Musi Perdana, yang beralamat kantor di Jalan Radial No. 25, Palembang,
	selanjutnya disebut Terlapor II ;
3.	PT. Putra Prabu, yang beralamat kantor di Jalan Radial No. 25, Palembang,
	selanjutnya disebut Terlapor III ;
4.	PT. Makassar Putra Perkasa, yang beralamat kantor di Jalan Andi Pangerar
	Pettarani, Kompleks Business Centre III Blok B/12, Makassar, selanjutnya disebut
	Terlapor IV;
5.	PT. Alexindo Sekawan, yang beralamat kantor di Jalan Kolonel Atmo No. 58 B RT
	014 RW 005, Kelurahan 17 ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, selanjutnya
	disebut Terlapor V;
6.	PT. Lematang Sentana, yang beralamat kantor di Jalan Dempo Luar No. 425-B
	Palembang, selanjutnya disebut Terlapor VI;
7.	Ketua Panitia Lelang Barang/Jasa Pembangunan Mall Kota Prabumulih, yang
	beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 1, Prabumulih, selanjutnya disebut
	Terlapor VII;
tela	ah mengambil Putusan sebagai berikut:
Ma	ajelis Komisi:
Set	telah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;
Set	telah mendengar keterangan para Terlapor;
Set	telah mendengar keterangan Saksi-saksi;
Set	telah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut BAP):

TENTANG DUDUK PERKARA

1.	Menimbang bahwa Komisi menerima laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran
	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan lelang pembangunan
	Mall di Kota Prabumulih Tahun 2006;
2.	Menimbang bahwa setelah Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan
	dinyatakan lengkap dan jelas;
3.	Menimbang bahwa atas laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Rapat Komisi pada
	tanggal 5 Juli 2007 menetapkan laporan tersebut ditindaklanjuti ke tahap Pemeriksaan
	Pendahuluan;
4.	Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor
	34/PEN/KPPU/VII/2007 tanggal 6 Juli 2007 tentang Pemeriksaan Pendahuluan
	Perkara Nomor 15/KPPU-L/2007, terhitung sejak tanggal 6 Juli 2007 sampai dengan
	16 Agustus 2007 (vide bukti A2);
5.	Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi
	menerbitkan Keputusan Nomor 122/KEP/KPPU/VII/2007 tanggal 5 Juli 2007 tentang
	Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan
	Perkara Nomor 15/KPPU-L/2007 (vide bukti A3);
6.	Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan
	Surat Tugas Nomor 430/SET/DE/ST/VII/2007 tanggal 9 Juli 2007 yang menugaskan
	Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan
	(vide bukti A4);
7.	Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah
	mendengar keterangan dari Terlapor I, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII (vide
	bukti B3, B7, B8, B9);
8.	Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa
	menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap dugaan pelanggaran Pasal 22
	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;
9.	Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa
	merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap
	Pemeriksaan Lanjutan (vide bukti B11);
10.	Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa Pendahuluan tersebut,
	Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor
	46/PEN/KPPU/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007 tentang Pemeriksaan Lanjutan

	Perkara Nomor 15/KPPU-L/2007, terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2007 sampar
	dengan 9 Januari 2008 (vide bukti A17);
11.	Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan
	Keputusan Nomor 154/KEP/KPPU/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007 tentang
	Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Pemeriksaan
	Lanjutan Perkara Nomor 15/KPPU-L/2007 (vide bukti A18);
12.	Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan
	Surat Tugas Nomor 566/SET/DE/ST/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007 yang
	menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa Lanjutan dalam
	Pemeriksaan Lanjutan (vide bukti A19);
13.	Menimbang bahwa dalam masa Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah
	mendengar keterangan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VI
	Terlapor VII dan para Saksi (vide bukti B27, B29, B31);
14.	Menimbang bahwa identitas dan keterangan para Terlapor dan para Saksi telah dicata
	dalam BAP yang telah diakui kebenarannya dan ditandatangani oleh yang
	bersangkutan;
15.	Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim
	Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen
	BAP serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan;
16.	Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa
	Lanjutan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya berisi:
	16.1. Tentang Identitas Terlapor;
	16.1.1. PT. Prabu Makmur selaku Terlapor I , beralamat kantor di Jalan
	Radial No. 25, Palembang, adalah pelaku usaha yang berbentuk
	badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-
	undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Komanditer
	yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 28 tanggal 28
	April 2006 yang dibuat oleh Notaris Mulkan Rasuwan yang
	melakukan kegiatan usaha pembangunan, perdagangan
	pengangkutan darat dan perbengkelan (vide bukti C14);
	16.1.2. PT. Sungai Musi Perdana selaku Terlapor II, beralamat kanton
	di Jalan Radial No. 25, Palembang, adalah pelaku usaha yang
	berbentuk badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan
	perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan
	Komanditer yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 07

- tanggal 13 September 2006 yang dibuat oleh Notaris Mulkan Rasuwan yang melakukan kegiatan usaha pembangunan, perdagangan, pengangkutan darat dan jasa (vide bukti C13);------
- 16.1.3. PT. Putra Prabu selaku Terlapor III, beralamat kantor di Jalan Radial No 25, Palembang, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundangundangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas vang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 45 tanggal 7 Oktober 1994 yang dibuat oleh Notaris Heniwati Ridwan, SH, yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan umum, termasuk perdagangan impor/ekspor, antar pulau baik untuk perhitungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain secara komisi, serta usaha sebagai leveransier, grossier, supplier, distributor dan perwakilan/keagenan perusahaan-perusahaan lain; melakukan usaha dalam bidang pembangunan, yaitu kontraktor, pemborongan pendirian bangunan-bangunan, pembuatan jembatanjembatan, jalan-jalan, irigasi dan pekerjaan-pekerjaan lainnya dalam bidang pembangunan; melakukan usaha yang berhubungan dengan bidang pengangkutan orang dan barang melalui darat; melakukan usaha dalam bidang perusahaan pembangunan perumahan (vide bukti C18); -----
- 16.1.4. PT. Makassar Putra Perkasa selaku Terlapor IV, beralamat kantor di Jalan Andi Pangeran Pettarani, Kompleks Business Centre III Blok B/12, Makassar, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didasarkan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 2 tanggal 1 September 2003 yang dibuat oleh Notaris Kasmaningsih Kasim, SH, yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang pembangunan, meliputi: pemborongan pada umumnya, pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, Bandara-Dermaga, pemasangan instalasi-instalasi; menjalankan usaha di bidang perdagangan eksport dan import, distributor, agent dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan, perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan property;

- 16.1.6. PT. Lematang Sentana selaku Terlapor VI, beralamat kantor di jalan Dempo Luar No. 425/B Palembang, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 16 tanggal 12 Desember 1989 yang dibuat oleh Notaris Enimarya Agoes Suwarko, S.H. yang melakukan kegiatan usaha selaku kontraktor, termasuk perencanaan, melaksanakan dan memborong pekerjaan pembangunan; perdagangan umum; pengangkutan leveransir, umum; selaku grossir, supplier, distributor; perindustrian; perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan; dan selaku agen dari perusahaan lain kecuali biro perjalanan/pariwisata (vide bukti C20);-----
- 16.1.7. Panitia Lelang Barang/Jasa Pembangunan Mall Kota Prabumulih selaku Terlapor VII, beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 1, Prabumulih, dibentuk dengan Keputusan

		Walikota Prabumulih Nomor: 367/KPTS/IV/2006 tanggal 5
		Oktober 2006 (vide bukti C7);
16.2.	Tentang I	Kegiatan Pra Lelang;
	16.2.1.	Bahwa Hak Guna Bangun (HGB) pedagang pasar tradisiona
		Prabumulih berakhir bulan Maret 2006, beberapa pedagang telah
		membayar lunas sewa namun sekitar 15% pedagang belum
		melunasi sehingga sertifikatnya masih menjadi agunan di BR
		(vide bukti B18);
	16.2.2.	Bahwa Walikota bersama-sama dengan Wakil Walikota telah
		berencana untuk membangun Pasar Modern Prabumulih, tetap
		pencetus ide untuk dilaksanakannya tender dalam rangka pencariar
		investor untuk membangun Pasar Modern Prabumulih adalah
		Wakil Walikota yang saat itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas
		(Plt) Walikota berdasarkan pertimbangan dari Kepala Bagiar
		Hukum (vide bukti B24);
	16.2.3.	Bahwa Plt. Walikota pernah ditemui oleh Ferry Soelisthio dar
		membicarakan mengenai tender pembangunan Pasar Modern
		Prabumulih. Ferry Sulisthio meminta ijin untuk melakukar
		presentasi di DPRD tentang rencananya untuk membangun Pasar
		Modern Prabumulih dan Plt. Walikota mengijinkannya (vide bukt
		B24);
	16.2.4.	Bahwa Ferry Soelisthio melakukan pemaparan/presentasi rencana
		pembangunan Pasar Modern Prabumulih di DPRD dan d
		Pemerintah Daerah Prabumulih. Plt. Walikota hanya menghadir
		pada saat pemaparan/presentasi di Pemerintah Daerah Prabumulih
		(vide bukti B24);
	16.2.5.	Bahwa Ferry Soelisthio yang bertindak sebagai Direktur Utama PT
		Prabu Makmur, adalah satu-satunya investor yang melakukar
		presentasi/pemaparan sebelum tender;
	16.2.6.	Bahwa sebelum dilakukan tender pembangunan mall tersebut
		Ferry Soelisthio sudah menjual rencana kios-kios kepada para
		pedagang baik dari Prabumulih maupun dari Palembang atas nama
		rekening PT. Putra Prabu di Bank Mandiri;
	16.2.7.	Bahwa belum ada Analisis Mengenai Dampak Lingkungar
		(AMDAL) untuk pembangunan pasar modern Prabumulih proses

		AMDAL diserahkan kepada investor, dan sampai saat ini AMDAL
		belum selesai sehingga pembangunan belum dapat dilakukan;
16.3.	Tentang	Dokumen Lelang (vide bukti C6);
	16.3.1.	Bahwa harga penawaran harus ditulis dengan jelas dalam angka
		dan huruf;
	16.3.2.	Bahwa dalam hal angka dan huruf berbeda, maka yang digunakan
		adalah dalam huruf;
	16.3.3.	Bahwa apabila harga penawaran dalam huruf tidak bisa
		diartikan/tidak bermakna, maka pada saat pembukaan penawaran
		ditulis "TIDAK JELAS";
	16.3.4.	Bahwa dalam evaluasi penawaran tidak boleh digugurkan dan
		harga penawaran yang berlaku adalah harga penawaran terkoreksi;
16.4.	Tentang	Pelaksanaan Lelang;
	16.4.1.	Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2006, Panitia Pengadaan
		Barang/Jasa Setda Kota Prabumulih mengumumkan pelelangan
		umum tentang undangan kepada investor (Penyedia Barang/Jasa)
		bidang arsitektur sub bidang gedung dan pabrik untuk mengikuti
		lelang pembangunan mall di Kota Prabumulih (vide bukti C7);
	16.4.2.	Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2006 sampai dengan 30 Oktober
		2006, dilakukan pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang
		(vide bukti C7);
	16.4.3.	Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2006, dilakukan aanwijzing dan
		dicatat dalam Berita Acara Penjelasan Pelelangan Nomor:
		07/PANT.Mall/2006;
	16.4.4.	Tanggal 31 Oktober 2006, dilakukan pemasukan dan pembukaan
		dokumen penawaran. Terdapat 7 perusahaan yang mendaftar dan
		mengambil dokumen serta memasukkan dokumen penawaran
		yaitu: PT. Makassar Putra Perkasa, PT. Sungai Musi Perdana, PT.
		Prabu Makmur, PT. Tiga Reka Persada, PT. Lematang Sentana,
		PT. Alexindo Sekawan, dan PT. Putra Prabu;
	16.4.5.	Bahwa berdasarkan hasil pembukaan sampul penawaran dan
		evaluasi dokumen penawaran, Panitia lelang menyatakan lelang
		pekerjaan pembangunan Mall Prabumulih gagal karena dari
		seluruh peserta tidak ada yang sah sehingga Panitia mengusulkan
		kepada Walikota Prabumulih untuk diadakan pelelangan ulang;

- 16.4.6. Bahwa pada tanggal 3 November 2006, Panitia mengumumkan lelang ulang pembangunan Mall Prabumulih untuk mengundang investor yang berminat dalam pelelangan ini dan dimuat dalam Harian Sriwijaya Post, Media Indonesia, dan papan pengumuman;
- 16.4.7. Bahwa pada tanggal 6 November 2006 sampai dengan 17 November 2006, dilakukan pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang. Ada 7 perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen lelang, ketujuh perusahaan tersebut merupakan peserta yang sama dengan lelang pertama; -------
- 16.4.8. Bahwa pada tanggal 20 November 2006, dilakukan pembukaan dokumen penawaran terhadap 7 perusahaan yang telah memasukkan dokumen penawaran dengan hasil sebagai berikut: --

No.	Peserta	Harga	Kontribusi
		Penawaran (Rp)	
1.	PT Makassar Putra Perkasa	78.234.424.000	600.000.000
2.	PT Sungai Musi Perdana	90.138.260.000	3.000.000.000
3.	PT Prabu Makmur	89.688.340.000	4.000.000.000
4.	PT Tiga Reka Persada	76.000.000.000	1.080.000.000
5.	PT Lematang Sentana	85.463.500.000	570.000.000
6.	PT Alexindo Sekawan	73.825.000.000	610.000.000
7.	PT Putra Prabu	91.474.500.000	7.500.000.000

- 16.4.9. Bahwa Panitia Lelang menyatakan ada 1 (satu) peserta yaitu PT Putra Prabu yang surat penawaran tidak sah karena nilai penawaran angka dengan huruf tidak sama; -------
- 16.4.11. Bahwa tidak ada aturan atau ketentuan dalam RKS yang menyatakan bahwa dalam pembukaan dokumen sudah dapat menggugurkan peserta. Panitia menggugurkan peserta (PT. Putra Prabu) hanya berdasarkan kebiasaan (*vide* bukti B9); -------
- 16.4.12. Bahwa pada tanggal 21 November 2006, Panitia lelang melakukan evaluasi dokumen penawaran terhadap 6 (enam) peserta lelang.
 Berdasarkan evaluasi administrasi yang dilakukan panitia, ada 4

(empat) peserta yang dinyatakan tidak lolos evaluasi administrasi vaitu: ------

No.	Peserta	Penjelasan
1.	PT Tiga Reka Persada	 Tidak ada SPT/PPh/PPN; Tidak melampirkan SBU;
2.	PT Alexindo Sekawan	 Tidak ada laporan bulanan PPh/PPn; Tidak melampirkan SBU
3.	PT Makassar Putra Perkasa	 Tidak ada NPWP; Tidak ada SPT/PPh/PPN; Tidak melampirkan SBU.
4.	PT Lematang Sentana	 Tidak ada SPT/PPh/PPN; SBU tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilelangkan; Pengalaman pekerjaan tidak sesuai.

16.4.13. Bahwa Panitia Lelang kemudian melakukan koreksi aritmatika terhadap seluruh penawaran dari 6 (enam) peserta dengan hasil sebagai berikut: ------

No.	Peserta	Harga Penawaran (Rp)	HargaTerkoreksi (Rp)
1.	PT Prabu Makmur	89.688.340.000	90.014.371.000
2.	PT Sungai Musi Perdana	90.138.260.000	90.483.097.000
3.	PT Tiga Reka Persada	76.000.000.000	76.207.937.000
4.	PT Makassar Putra Perkasa	78.234.424.000	78.559.007.000
5.	PT Lematang Sentana	85.463.500.000	85.820.541.000
6.	PT Putra Prabu	91.474.500.000	74.110.177.000

- 16.4.14. Bahwa pada tanggal 22 November 2006, Panitia Lelang kemudian melakukan evaluasi teknis terhadap 2 peserta lelang yang lolos evaluasi administrasi yaitu PT Prabu Makmur dan PT Sungai Musi Perdana. Kedua perusahaan peserta lelang tersebut dinyatakan telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis untuk kemudian dilakukan evaluasi harga;-------
- 16.4.15. Bahwa pada tanggal 23 November 2006, Panitia Lelang melakukan evaluasi harga dengan hasil sebagai berikut: ------

No.	Peserta	Harga	Kontribusi	Ket
		Penawaran (Rp)	(Rp)	
1.	PT Prabu Makmur	Rp 89.688.340.000	4.000.000.000	Wajar
2.	PT Sungai Musi Perdana	Rp 90.138.260.000	3.000.000.000	Wajar

16.4.16. Bahwa pada tanggal 28 November 2006, berdasarkan hasil evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi, maka Panitia mengusulkan kepada Pengelola Barang/Jasa kegiatan pembangunan Mall Kota Prabumulih untuk menetapkan pemenang lelang yaitu:

Usulan	Peserta	Harga Penawaran (Rp)	Harga Terkoreksi (Rp)	Kontribusi (Rp)
Calon Pemenang I	PT Prabu Makmur	89.688.340.000	90.014.371.000	4.000.000.000
Calon Pemenang II	PT Sungai Musi Perdana	90.138.260.000	90.483.097.000	3.000.000.000

16.4.17. Bahwa pada tanggal 30 November 2006, Panitia Lelang mengumumkan PT Prabu Makmur sebagai pemenang lelang pekerjaan pembangunan Mall Kota Prabumulih; ------

16.5. Tentang Terlapor I;------

- 16.5.1. Bahwa Terlapor I dengan pemiliknya Ferry Soelisthio merupakan satu-satunya peserta lelang yang melakukan pemaparan/presentasi tentang rencana pembangunan mall di Kantor Pemerintah Daerah dan di DPRD Kota Prabumulih sebelum dilaksanakan lelang oleh Panitia (*vide* bukti B3, B9);-------
- 16.5.2. Bahwa dengan adanya ketentuan PP No. 06 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka atas saran dari Terlapor VII, Terlapor I diminta untuk mencari perusahaan lainnya sebagai peserta pendamping agar jumlah peserta yang mendaftar dapat memenuhi persyaratan yang sah yaitu minimal ada 5 (lima) perusahaan yang mendaftar (*vide* bukti B3); --------
- 16.5.3. Bahwa dalam mengikuti lelang ini, Terlapor I memasukkan ketiga perusahaannya yaitu: PT. Putra Prabu, PT. Sungai Musi Perdana, dan PT. Makassar Putra Perkasa (*vide* bukti B3);------
- 16.5.4. Bahwa selain ketiga perusahaannya, Terlapor I juga memasukkan dua perusahaan lainnya yaitu: PT. Alexindo Sekawan dan PT. Lematang Sentana (*vide* bukti B3);------
- 16.5.5. Bahwa Terlapor I memasukkan ketiga perusahaannya dan dua perusahaan lainnya dengan maksud untuk dapat memenuhi

		persyaratan sah jumlah peserta yang mendaftar yaitu minimal 5
		(lima) perusahaan (vide bukti B3, B27);
16.6.	Tentang	Terlapor II;
	16.6.1.	Bahwa Terlapor II dengan pemiliknya Ferry Soelisthio merupakan
		perusahaan satu grup dengan Terlapor I (vide B31);
	16.6.2.	Bahwa Saudara Ainal Lukman merupakan Kuasa Direktur yang
		diberi kuasa oleh Ibu Ellen sebagai Direktur PT. Sungai Musi
		Perdana (vide bukti B31);
	16.6.3.	Bahwa PT. Sungai Musi Perdana saat ini sudah berakhir dan
		selama berdirinya perusahaan tersebut hanya mengikuti tender di
		lelang pembangunan Mall Prabumulih (vide B31);
16.7.	Tentang	Terlapor III;
	16.7.1.	Bahwa Terlapor III dengan pemiliknya Ferry Soelisthio merupakan
		perusahaan satu grup dengan Terlapor I (vide bukti B31);
	16.7.2.	Bahwa sebelum pelaksanaan lelang, Ferry Soelisthio telah menjual
		rencana kios-kios tersebut kepada pembeli dari Prabumulih
		maupun dari Palembang yang pembayarannya melalui rekening
		PT. Putra Prabu di Bank Mandiri (vide bukti B12, C3);
	16.7.3.	Bahwa Terlapor III dalam menghitung harga penawarannya
		dibantu oleh Saudara Andy yang disewa oleh Ferry Soelisthio
		untuk menjadi Kuasa Direktur PT. Lematang Sentana (vide bukti
		B31);
	16.7.4.	Bahwa harga penawaran dan kontribusi Terlapor III dalam lelang
		ulang merupakan instruksi dari Ferry Soelisthio (vide bukti B31); -
16.8.	Tentang	Terlapor IV;
	16.8.1.	Bahwa Terlapor IV dengan pemiliknya Ferry Soelisthio merupakan
		perusahaan satu grup dengan Terlapor I (vide bukti B31);
	16.8.2.	Bahwa Terlapor IV mengetahui pengumuman lelang tersebut dari
		Ferry Soelisthio dan Ferry Soelisthio juga yang memerintahkan
		agar Terlapor IV mengikuti lelang ini (vide bukti B31);
	16.8.3.	Bahwa Terlapor IV menyatakan daftar nama tenaga ahli dalam
		dokumen penawarannya adalah memang bukan merupakan
		pegawai dari Terlapor IV (vide bukti B31);

16.9.	Tentang 7	Гегlapor V;
	16.9.1.	Bahwa Terlapor V merupakan perusahaan lain dan bukan satu grup
		dengan Terlapor I (vide bukti B7);
	16.9.2.	Bahwa Terlapor V mengikuti lelang dengan Kuasa Direktur
		Saudara Freddy Effendy yang mewakili Saudara Alex Direktur PT.
		Alexindo Sekawan (vide bukti B7);
	16.9.3.	Bahwa Saudara Freddy Effendy merupakan pegawai freelance PT.
		Prabu Makmur, mendapat tugas dari Ferry Soelisthio untuk
		mewakili PT. Alexindo Sekawan yang berperan sebagai
		pendamping PT. Prabu Makmur (vide bukti B19);
16.10.	Tentang [Terlapor VI;
	16.10.1.	Bahwa Terlapor VI merupakan perusahaan lain dan bukan satu
		grup dengan Terlapor I (vide bukti B8);
	16.10.2.	Bahwa Terlapor VI mengikuti lelang dengan Kuasa Direktur
		Saudara Andy yang mewakili Saudara Jusuf Chandra Direktur PT.
		Lematang Sentana atas perintah Ferry Soelisthio (vide bukti B20);
	16.10.3.	Bahwa Saudara Jusuf Chandra selaku direktur dan pemilik PT.
		Lematang Sentana mengaku tidak pernah mengikuti lelang ini,
		semua dokumen penawaran milik PT. Lematang Sentana sebagian
		ada yang dipalsukan, baik tanda tangan direktur maupun stempel
		perusahaan (vide bukti B8, C28);
	16.10.4.	Bahwa Saudara Jusuf Chandra mendapat informasi dari stafnya
		mengenai dokumen PT. Lematang Sentana yang pernah dipinjam
		oleh Saudara Alex Suherman (Direktur PT. Alexindo Sekawan)
		setahun lalu yang berisi company profile, SBU, SIUP, dan
		dokumen lainnya (vide bukti B29);
	16.10.5.	Bahwa setelah diperiksa oleh KPPU, Saudara Jusuf Chandra
		pernah dihubungi oleh Ferry Soelisthio melalui Saudara Alex
		Suherman untuk mengakui PT. Lematang Sentana mengikuti
		lelang pembangunan mall tersebut, namun Saudara Jusuf Chandra
		tidak mau mengakui dan melalui kuasa hukumnya mengirimkan
		surat kepada PT. Prabu Makmur (vide bukti B29);
16.11.	Tentang 7	Геrlapor VII;
	16.11.1.	Bahwa Terlapor VII selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa
		Pembangunan Mall Kota Prabumulih tahun 2006 tidak melakukan

- dan juga tidak mengawasi saat dilakukannya evaluasi terhadap surat penawaran dari peserta tender dikarenakan Terlapor VII sedang melakukan tugas luar, evaluasi hanya dilakukan oleh anggota panitia tender kemudian hasil evaluasi tersebut dilaporkan kepada Terlapor VII (*vide* bukti B30); ------
- 16.11.3. Bahwa Terlapor VII menyatakan tidak pernah menghubungi salah satu peserta tender untuk mencarikan pendamping (*vide* bukti B9, B30); ------
- 16.11.4. Bahwa Terlapor VII menilai PT. Prabu Makmur telah memiliki dokumen persyaratan yang lengkap untuk dijadikan pemenang walaupun PT. Prabu Makmur tidak memiliki SBU dengan kualifikasi B1 tapi hanya memberikan surat keterangan yang menerangkan bahwa PT. Prabu Makmur sedang dalam proses validasi dan surat keterangan tersebut berlaku sampai dengan 11 Desember 2006 (vide bukti B30);-------
- 17. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada Komisi untuk dilaksanakan Sidang Majelis Komisi; ---
- 18. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 03/KPPU/PEN/I/2008 tanggal 8 Januari 2008, untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi terhitung sejak tanggal 9 Januari 2008 sampai dengan 25 Pebruari 2008;------
- 20. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 03/SET/DE/ST/I/2008 tanggal 14 Januari 2008 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi;--

21.	Menimbang bahwa pada tanggal 21 Januari 2008, Majelis Komisi menyampaikan		
	Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor untuk ditanggapi dalan		
	suatu pembelaan;		
22.	Menimbang bahwa pada tanggal 28 Januari 2008, Majelis Komisi memberikan		
	kesempatan kepada para Terlapor untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara		
	dalam rangka penyusunan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dituduhkan;		
23.	Menimbang bahwa pada tanggal 28 Januari 2008, Terlapor VI telah hadir untul		
	melakukan pemeriksaan berkas perkara sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; -		
24.	Menimbang bahwa pada tanggal 4 Pebruari 2008, Majelis Komisi telah melakukar		
	Sidang Majelis yang dihadiri oleh Terlapor I, Terlapor VI, dan Terlapor VII serta		
	menerima pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepada para		
	Terlapor dari Terlapor VI dan Terlapor VII;		
25.	Menimbang bahwa pembelaan dari Terlapor VI yang pada pokoknya menyatakan		
	sebagai berikut;		
	25.1. Bahwa Terlapor VI menerima hasil analisis dari salinan laporan pemeriksaan		
	lanjutan;		
	25.2. Bahwa Terlapor VI memohon untuk tidak lagi dilibatkan dalam perkara aquo;		
	25.3. Bahwa Terlapor VI memohon untuk dinyatakan tidak terlibat persekongkolan		
	dalam tender pembangunan Mall Kota Prabumulih;		
	25.4. Bahwa Terlapor VI memohon dibebaskan dari perkara persekongkolan dalan		
	tender pembangunan Mall Kota Prabumulih;		
26.	Menimbang bahwa pembelaan dari Terlapor VII yang pada pokoknya menyatakan		
	sebagai berikut;		
	26.1. Bahwa perbuatan dari Terlapor VII belum mengakibatkan kerugian bagi pihal		
	manapun;		
	26.2. Bahwa Terlapor VII hanya menyiapkan lahan/tanah untuk kepentingan		
	masyarakat Kota Prabumulih khususnya dan masyarakat Indonesia pada		
	umumnya, sedangkan keseluruhan dana tender ditanggung oleh investor;		
27.	Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dar		
	penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan;		
	TENTANG HUKUM		
	I EN I ANG HUKUWI		

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, pendapat atau

pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut: ------

1.

hal. 14 dari 23

1.1. Tentang Identitas Terlapor; ------

- 1.1.1. Bahwa Terlapor I adalah PT. Prabu Makmur sebagaimana telah diuraikan pada butir 16.1.1. Bagian Duduk Perkara yang dalam prakteknya telah mengikuti lelang pembangunan Mall di Kota Prabumulih tahun 2006 merupakan subyek hukum yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai Terlapor dalam perkara *a quo*;----
- 1.1.2. Bahwa Terlapor II adalah PT. Sungai Musi Perdana sebagaimana telah diuraikan pada butir 16.1.2. Bagian Duduk Perkara yang dalam prakteknya telah mengikuti lelang pembangunan Mall di Kota Prabumulih tahun 2006 merupakan subyek hukum yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai Terlapor dalam perkara *a quo*;----
- 1.1.3. Bahwa Terlapor III adalah PT. Putra Prabu sebagaimana telah diuraikan pada butir 16.1.3. Bagian Duduk Perkara yang dalam prakteknya telah mengikuti lelang pembangunan Mall di Kota Prabumulih tahun 2006 merupakan subyek hukum yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai Terlapor dalam perkara *a quo*;---
- 1.1.4. Bahwa Terlapor IV adalah PT. Makassar Putra Perkasa sebagaimana telah diuraikan pada butir 16.1.4. Bagian Duduk Perkara yang dalam prakteknya telah mengikuti lelang pembangunan Mall di Kota Prabumulih tahun 2006 merupakan subyek hukum yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai Terlapor dalam perkara *a quo*;---
- 1.1.5. Bahwa Terlapor V adalah PT. Alexindo Sekawan sebagaimana telah diuraikan pada butir 16.1.5. Bagian Duduk Perkara yang dalam prakteknya telah mengikuti lelang pembangunan Mall di Kota Prabumulih tahun 2006 merupakan subyek hukum yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai Terlapor dalam perkara *a quo*;---
- 1.1.6. Bahwa Terlapor VI adalah PT. Lematang Sentana sebagaimana telah diuraikan pada butir 16.1.6. Bagian Duduk Perkara yang dalam prakteknya tidak mengikuti lelang pembangunan Mall di Kota Prabumulih tahun 2006 merupakan subyek hukum yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai Terlapor dalam perkara *a quo*;---
- 1.1.7. Bahwa Terlapor VII adalah Panitia Lelang Barang/Jasa Pembangunan Mall Kota Prabumulih sebagaimana telah diuraikan pada butir 16.1.7. Bagian Duduk Perkara yang dalam prakteknya telah melaksanakan lelang pembangunan Mall di Kota Prabumulih

		tahun 2006 merupakan subyek hukum yang memenuhi persyaratan
		untuk dijadikan sebagai Terlapor dalam perkara a quo;
1.2.	Tentan	g Kegiatan Pra Lelang;
	1.2.1.	Bahwa rencana pembangunan Mall di Kota Prabumulih merupakan
		rencana yang termasuk dalam kategori strategis sehingga
		pelaksanaan lelang pembangunan Mall tersebut seharusnya mendapat
		ijin dari Gubernur Sumatera Selatan;
	1.2.2.	Bahwa tindakan Ferry Soelisthio (Direktur dan pemilik PT. Prabu
		Makmur) yang menghubungi Plt. Walikota untuk meminta ijin dan
		melakukan pemaparan baik di kantor Pemerintah Kota Prabumulih
		dan DPRD Kota Prabumulih merupakan upaya melakukan
		pendekatan dan kesepakatan-kesepakatan dengan penyelenggara
		sebelum pelaksanaan tender adalah bentuk-bentuk persekongkolan
		tender;
	1.2.3.	Bahwa tindakan Ferry Soelisthio yang sudah menjual rencana kios-
		kios kepada para pedagang baik dari Prabumulih maupun dari
		Palembang atas nama rekening PT. Putra Prabu di Bank Mandir
		sebelum dilakukan tender pembangunan mall tersebut merupakan
		tindakan yang memastikan bahwa salah satu perusahaan milik Ferry
		Soelisthio adalah pemenang dalam lelang tersebut;
1.3.	Tentan	g Dokumen Lelang;
	1.3.1.	Bahwa dijelaskan dalam Dokumen Lelang apabila terjadi perbedaan
		antara angka dan huruf maka yang digunakan adalah dalam huruf;
	1.3.2.	Bahwa dijelaskan pula dalam evaluasi penawaran tidak boleh
		digugurkan;
1.4.	Tentan	g Pelaksanaan Lelang;
	1.4.1.	Bahwa PT. Putra Prabu seharusnya sebagai pemenang karena
		memiliki nilai kontribusi terbesar dan seharusnya tidak boleh
		digugurkan dalam evaluasi penawaran;
	1.4.2.	Bahwa dengan demikian, tindakan Terlapor VII yang menggugurkan
		PT. Putra Prabu dan memenangkan PT. Prabu Makmur merupakan
		tindakan menghambat persaingan yang sehat dan tindakan yang
		mengatur dan menentukan pemenang tertentu;
	1.4.3.	Bahwa tindakan Terlapor VII yang menggugurkan PT. Putra Prabu
		dan memenangkan PT Prahu Makmur menyebahkan terjadinya

			Kota Prabumulih sebesar Rp. 87,5 milyar yang berasal dari selisih
			kontribusi PT. Putra Prabu dengan PT. Prabu Makmur selama 25
			tahun;
	1.5.	Tentang	g Para Terlapor;
		1.5.1.	Bahwa berdasarkan keterangan para terlapor dan saksi serta dokumen lainnya, Majelis Komisi menilai bahwa Terlapor VI (PT. Lematang Sentana) tidak mengikuti dan tidak terlibat dalam persekongkolan lelang pembangunan Mall di Kota Prabumulih tahun
			2006;
		1.5.2.	Bahwa berdasarkan keterangan para terlapor dan saksi serta dokumen lainnya, Majelis Komisi menilai bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VII terlibat dalam persekongkolan lelang pembangunan Mall di Kota Prabumulih tahun 2006;
2.	Menin	nbang ba	hwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan
	"Pelal	ku usaha	dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau
	menen	tukan pe	menang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan
	usaha	tidak seh	at;
3.	Menin	nbang ba	hwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran
	Pasal	22 Un	dang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi
	memp	ertimbang	gkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999
	sebaga	i berikut:	:
	3.1.	Unsur p	elaku usaha:
)))	Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undangundang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum vang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;
			Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Ferlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Ferlapor VI yang identitasnya disebutkan dalam bagian Tentang Duduk Perkara butir 16.1.1. sampai dengan 16.1.6. putusan ini;

potensi kerugian (potential loss opportunity) pendapatan Pemerintah

	3.1.3.	Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha terpenuhi;
3.2.	Unsur	bersekongkol:
	3.2.1.	Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman
		Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah kerjasama yang
		dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun
		dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender
		tertentu;
	3.2.2.	Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (8) Undang-undang Nomor 5 Tahun
		1999, persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama
		yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan
		maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku
		usaha yang bersekongkol;
	3.2.3.	Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5
		Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu
		persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan
		dari persekongkolan horizontal dan vertikal;
	3.2.4.	Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah
		persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang
		dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa
		pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang
		terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia
		barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau
		pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan,
		sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah
		persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna
		barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama
		pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;
	3.2.5.	
		oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V, dan
		Terlapor VII dalam bentuk sebagai berikut:
		3.2.5.1. Persekongkolan Horizontal;
		3.2.5.1.1. Bahwa tindakan Terlapor I memasukkan ketiga
		perusahaannya dan dua perusahaan lainnya
		dengan maksud untuk dapat memenuhi
		persyaratan sah jumlah peserta yang mendaftar

		persekongkolan tender yaitu menciptakan
		persaingan semu antar peserta;
	3.2.5.1.2.	Bahwa tindakan Terlapor I yang bekerja sama
		dengan Terlapor V untuk mendapatkan
		dokumen penawaran Terlapor VI sehingga dapat
		mendaftarkan dan memasukkan dokumen
		penawaran Terlapor VI tanpa sepengetahuan
		direkturnya adalah bentuk persekongkolan
		tender yaitu melakukan manipulasi persyaratan
		teknis dan administratif;
	3.2.5.1.3.	Bahwa dengan demikian, Terlapor I, Terlapor II,
		Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V
		terlibat dalam persekongkolan horizontal;
	3.2.5.2. Persekong	gkolan Vertikal;
	3.2.5.2.1.	Bahwa tindakan Ferry Soelisthio (Direktur dan
		pemilik PT. Prabu Makmur) yang menghubungi
		Plt. Walikota untuk meminta ijin melakukan
		pemaparan baik di kantor Pemerintah Kota
		Prabumulih dan DPRD Kota Prabumulih dan
		melakukan pemaparan baik di kantor
		Pemerintah Kota Prabumulih dan DPRD Kota
		Prabumulih merupakan upaya melakukan
		pendekatan dan kesepakatan-kesepakatan
		dengan penyelenggara sebelum pelaksanaan
		tender adalah bentuk persekongkolan tender;
	3.2.5.2.2.	Bahwa dengan demikian, Terlapor I dan
		Terlapor VII terlibat dalam persekongkolan
		vertikal;
		tian, unsur bersekongkol terpenuhi ;
3.3.		
	, ,	sud dengan pihak lain adalah para pihak yang
	-	s tender yang melakukan persekongkolan tender
	-	sebagai peserta tender dan atau subyek hukum
	laınnya yang terkait o	lengan tender tersebut;

(minimal 5 perusahaan) adalah bentuk

	3.3.2.	Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V,
		dan Terlapor VII adalah pihak lain yang terlibat dalam proses tender,
		yang identitasnya disebutkan dalam bagian Tentang Duduk Perkara
		butir 16.1.1. sampai dengan 16.1.7. putusan ini;
	3.3.3.	Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain terpenuhi ;
3.4.	Unsur	Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender;
	3.4.1.	Bahwa yang dimaksud dengan tender berdasarkan penjelasan Pasal 22
		Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tawaran mengajukan
		harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-
		barang, atau untuk menyediakan jasa;
	3.4.2.	Bahwa yang dimaksud tender dalam perkara ini adalah tawaran
		mengajukan harga untuk pembangunan Mall di Kota Prabumulih tahun
		2006;
	3.4.3.	Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan atau menentukan
		pemenang tender berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang No.
		5 Tahun 1999 adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam
		proses tender untuk bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan
		pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau memenangkan peserta
		tender tertentu dengan cara-cara tertentu;
	3.4.4.	Bahwa tindakan Terlapor I bersama-sama dengan Terlapor II, Terlapor
		III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VII yang terlibat dalam
		persekongkolan lelang serta tindakan Terlapor VII yang
		menggugurkan Terlapor III (PT. Putra Prabu) dan memenangkan
		Terlapor I (PT. Prabu Makmur) adalah tindakan untuk mengatur dan
		atau menentukan pemenang tender;
	3.4.5.	Bahwa dengan demikian, unsur mengatur dan atau menentukan
		pemenang tender, terpenuhi;
3.5.	Unsur	Persaingan Usaha Tidak Sehat:
	3.5.1.	Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yang
		ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun
		1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan
		kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang
		dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau
		menghambat persaingan usaha;

	3.5.2. Bahwa tindakan bersekongkol sebagaimana diuraikan dalam butir
	3.2.5. bagian Tentang Hukum dan tindakan mengatur dan atau
	menentukan pemenang tender sebagaimana diuraikan dalam butir
	3.4.4. bagian Tentang Hukum dilakukan dengan cara tidak jujur,
	melawan hukum, dan menghambat peserta tender lainnya untuk
	menjadi pemenang tender;
	3.5.3. Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat,
	terpenuhi;
4.	Menimbang bahwa sebelum mengambil Putusan, Majelis Komisi mempertimbangkan
	hal-hal sebagai berikut:
	4.1. Bahwa selama proses Pemeriksaan Pendahuluan, Terlapor II, Terlapor III, dan
	Terlapor IV tidak hadir memenuhi panggilan Tim Pemeriksa Pendahuluan;
	4.2. Bahwa selama proses Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor V tidak hadir memenuhi
	panggilan Tim Pemeriksa Lanjutan;
	4.3. Bahwa dalam Sidang Majelis, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor
	V tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi;
	4.4. Bahwa selama proses pemeriksaan, Terlapor I, Terlapor VI, dan Terlapor VII
	bersikap kooperatif;
	4.5. Bahwa dalam pemeriksaan lanjutan, Terlapor I memberikan pengakuan atas
	terjadinya persekongkolan dalam lelang ini;
5.	Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e
	Undang-undang No. 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi
	hal-hal sebagai berikut:
	5.1. Meminta atasan Terlapor VII untuk memberikan sanksi administratif atas
	kesalahan-kesalahan Terlapor VII sesuai dengan peraturan perundangan yang
	berlaku;
	5.2. Meminta atasan Terlapor VII untuk merekrut Panitia Lelang berbasis kompetensi
	dan memahami peraturan lelang yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola
	pemerintahan yang baik (Good Governance)
6.	Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta analisis di atas, dan dengan mengingat Pasal
43 avat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Majelis Komisi:	

MEMUTUSKAN

- 1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VII **terbukti secara sah dan meyakinkan** melanggar Pasal 22 Undangundang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;------
- 2. Menyatakan Terlapor VI **tidak terbukti** melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat:------
- 3. Membatalkan hasil lelang pembangunan Mall di Kota Prabumulih tahun 2006; -----

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Rabu tanggal 13 Pebruari 2008 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 15 Pebruari 2008 oleh kami Majelis Komisi, Prof. Tresna P. Soemardi sebagai Ketua Majelis Komisi, H. Didik Akhmadi, Ak, M.Comm., dan Dr. A.M. Tri Anggraini, SH, MH., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dibantu oleh Akhmad Muhari, S.H., dan Lina Mardhiana, SE masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis, t.t.d.

Prof. Tresna P. Soemardi

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

H. Didik Akhmadi, Ak, M.Comm.

Dr. A.M. Tri Anggraini, SH, MH.

Panitera,

t.t.d. t.t.d.

Akhmad Muhari, S.H.

Lina Mardhiana, SE

Untuk Salinan yang sah: SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA a.n. Direktur Penegakan Hukum Kasubdit Monitoring Putusan dan Litigasi

Mohammad Reza, S.H.